



RENSTRA 2024 - 2026

KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR



**KECAMATAN
PADANG PANJANG TIMUR**
JL. H. SUMANIK NO. 1 PADANG PANJANG TELP. 0752-82894

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 Kecamatan Padang Panjang Timur ini.

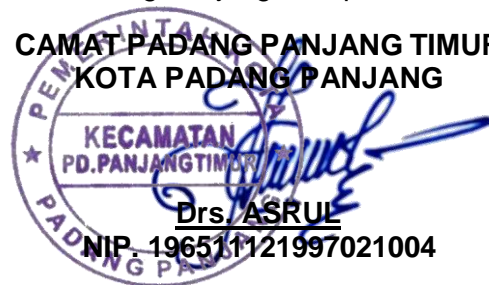
Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi kewajiban Kecamatan Padang Panjang Timur dalam menyelenggarakan pemerintahan dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Padang Panjang Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan yakni Tahun 2024-2026.

Mudah-mudahan Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur ini dapat menjadi pedoman dan arahan kinerja bagi seluruh komponen aparatur Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Timur. Usaha maksimal dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah kami lakukan, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka kami senantiasa meminta petunjuk, kritik serta saran guna perbaikan dari penulisan Rencana Strategis ini.

Akhir kata semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan. Aamiin.

Padang Panjang, April 2023

**CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG**



Drs. ASRUL

NIP. 196511121997021004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	7
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Padang Panjang Timur	7
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Padang Panjang Timur	13
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur	17
	2.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Padang Panjang Timur	28
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	30
	3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur	30
	3.2 Isu Strategis	34
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	35
	4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024-2026	35
	4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur	41
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	46
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	55
BAB VIII	PENUTUP	56

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

A. TABEL

1.	Tabel 2.1 Data Pegawai ASN, Pegawai Honorer, Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Timur	13
2.	Tabel 2.2 Data Kepegawaian Menurut Golongan	14
3.	Tabel 2.3 Data Kepegawaian Menurut Eselon	15
4.	Tabel 2.4 Data Kepegawaian Menurut Jenjang Pendidikan	15
5.	Tabel 2.5 Data Kepegawaian Menurut Diklat Yang Diikuti	15
6.	Tabel 2.6 Sarana Prasarana Kecamatan Padang Panjang Timur	16
7.	Tabel 2.7 (TC-23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2018-2022	18
8.	Tabel 2.8 (TC-24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2019-2023	23
9.	Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	31
10.	Tabel 4.1 (TC-25) Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur	36
11.	Tabel 4.2 Perhitungan Nilai SKM Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2021	39
	Tabel 4.3 Perhitungan Nilai SKM Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2022	40
12.	Tabel 5.1 (TC-26) Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Kecamatan Padang Panjang Timur	44
13.	Tabel 6.1 Keterkaitan Kelompok Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024-2026	46
13.	Tabel 6.2 (TC-27) Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024-2026	50
14.	Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Padang Panjang 2024-2026	55

B. GAMBAR

1.	Gambar 1 : Struktur Organisasi Kecamatan Padang Panjang Timur	11
2.	Gambar 2 : Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Padang Panjang Timur	12
3.	Gambar 3 : Pohon Masalah Kecamatan	32
4.	Gambar 4 : Cascading Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024-2026	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun atas dasar Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024 sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilu pada 2024.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan periode Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sebagai

salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan menyusun Renstra Tahun 2024-2026.

Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ini disusun oleh Tim Penyusun Renstra yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Proses penyusunan dimulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap penetapan Renstra.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 - h. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447) tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
- o. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1063);
- p. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 07);
- q. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 06);
- r. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- s. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
- t. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
- u. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat : (7/119/2021);

- v. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 32);
- w. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 06).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

➤ MAKSUD

Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai penjabaran untuk dijadikan pedoman/acuan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan penyelenggaraan pelayanan publik serta sebagai acuan untuk mengukur akuntabilitas serta menilai keberhasilan pelaksanaan program kerja selama 3 (tiga) tahun kedepan.

➤ TUJUAN

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur adalah untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang akan dijalankan di Kecamatan Padang Panjang Timur agar terarah serta dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi di Kecamatan Padang Panjang Timur yaitu :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur;
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan program/kegiatan selama 3 (tiga) tahun kedepan;
- c. Menerjemahkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur;
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode 2024-2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategi Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Padang Panjang Timur
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Padang Panjang Timur;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur;
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Padang Panjang Timur.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur
- 3.2 Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024-2026;
- 4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan bahwa Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, terdiri dari :

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Padang Panjang Timur

Camat :

- Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sekretariat :

- Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan kecamatan yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari :

1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program umum dan kepegawaian alam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebuuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan.

2) **Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan, melakukan perencanaan, dokumentasi kegiatan pembangunan perhubungan, koordinasi penusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pembangunan perhubungan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.

Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di kelurahan-kelurahan, urusan kesatuan bangsa, kependudukan, ketenagakerjaan dan pengelolaan pendapatan daerah di ruang lingkup Kecamatan Padang Panjang Timur, mengkoordinir kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan membuat rekomendasi akte catatan sipil serta melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi perizinan sporadik tanah.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanaman modal, tenaga kerja pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, pembinaan lomba Kelurahan dan urusan pembangunan di Kecamatan.

Seksi Sosial

- Seksi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan sosial dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olah raga, kesehatan, pengendalian penduduk, KB, perlindungan anak dan perempuan.

Seksi Pelayanan

- Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pelayanan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup kecamatan dan kelurahan

2.1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Timur

Lurah :

- Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketertiban umum, memelihara prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan umum, dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sekretariat :

- Sekretariat mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, pemeliharaan aset dan keuangan di lingkup Kelurahan.

Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan ketertiban umum dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, pembinaan lomba kelurahan dan lurah berkompentensi, urusan kesatuan bangsa dan politik, kependudukan, mengkoordinasikan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban bangunan, pembuangan air limbah, pengaliran drainase, persampahan, penanggulangan bencana, perpustakaan dan kearsipan di kelurahan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

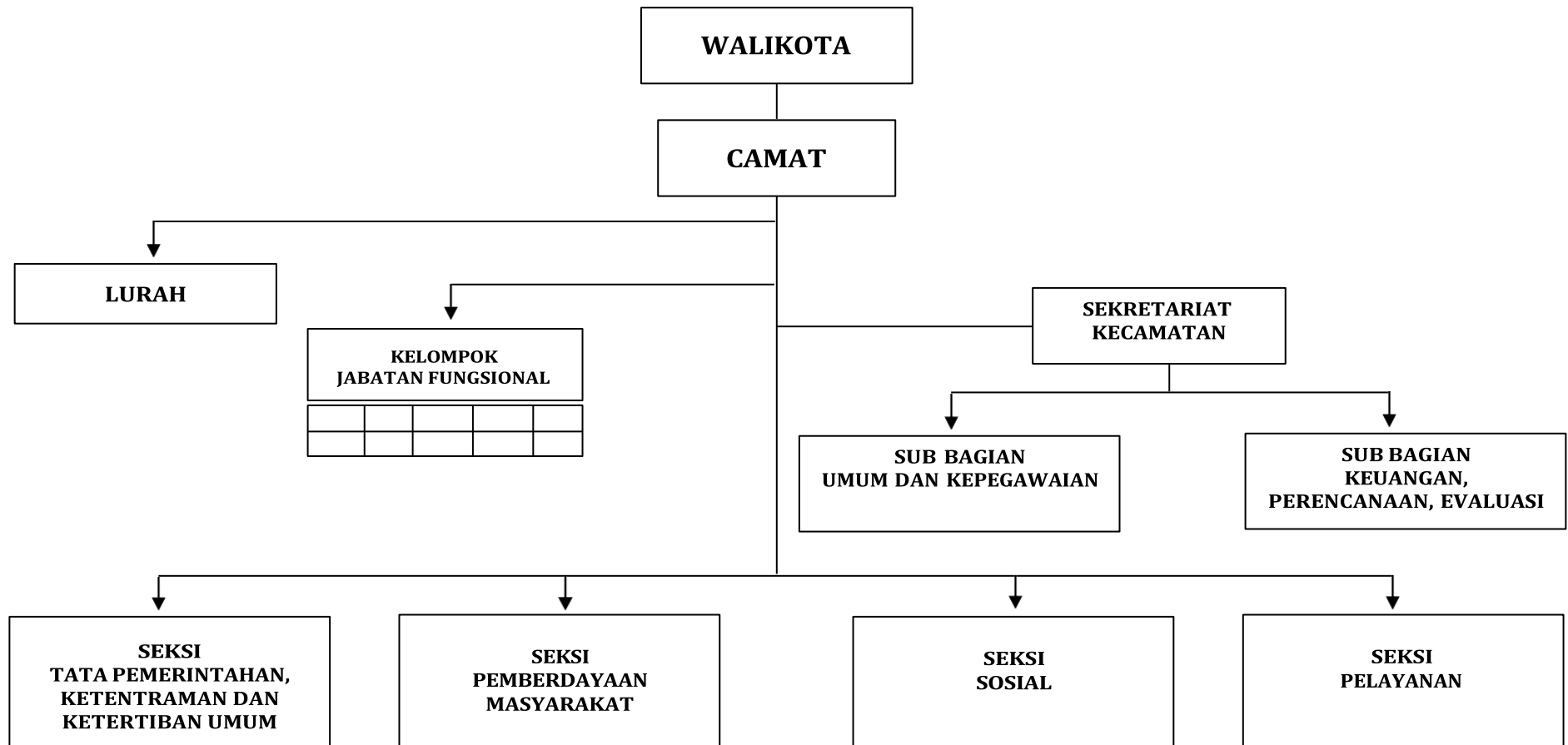
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanaman modal, tenaga kerja pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, urusan pembangunan dan penataan ruang, perumahan kawasan pemukiman dan lingkungan hidup di Kelurahan.

Seksi Pelayanan dan Sosial

- Seksi Pelayanan dan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pelayanan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan, sosial, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, perlindungan anak dan perempuan di Kelurahan.

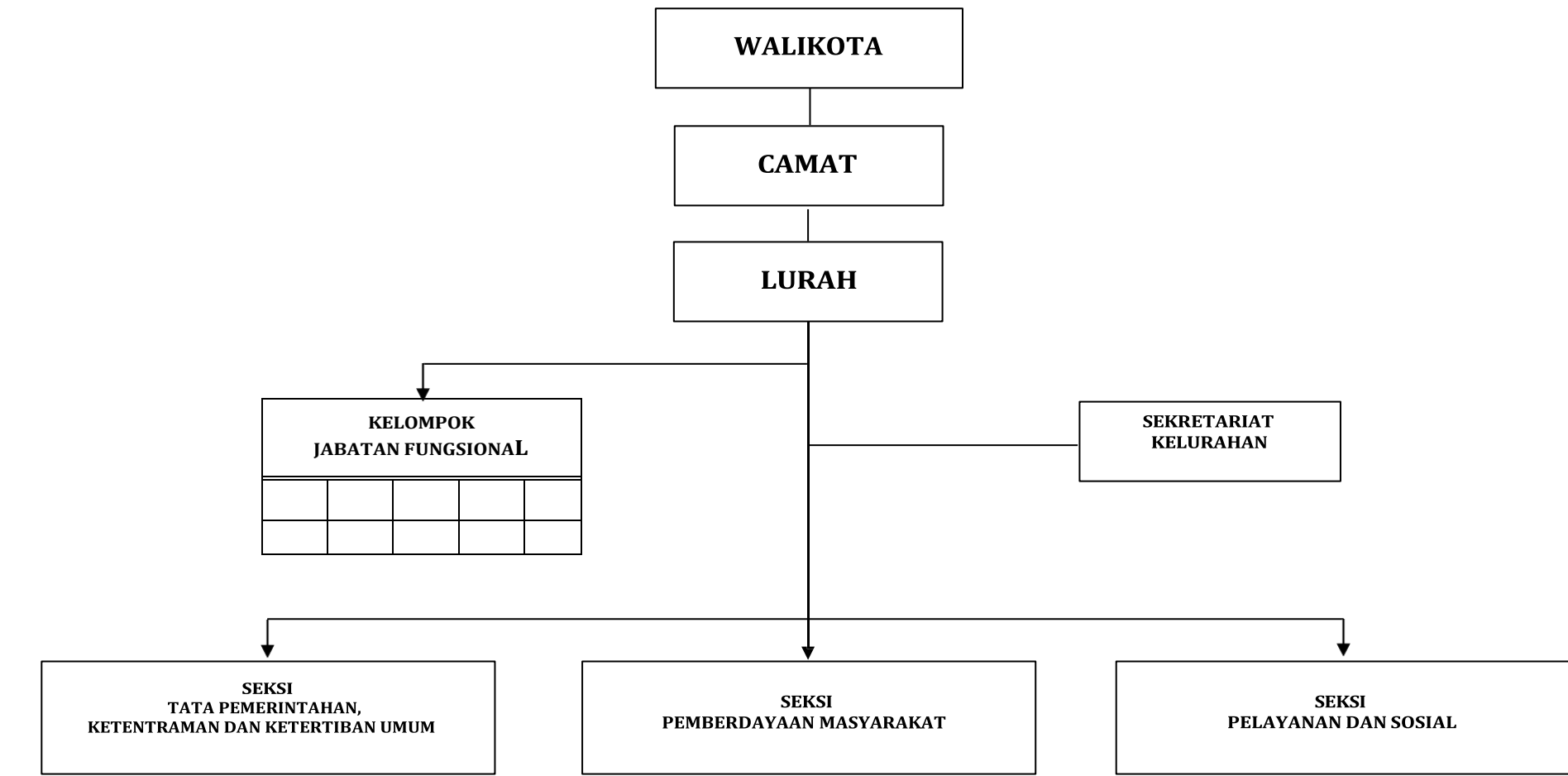
Gambar 1 : STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019



Gambar 2 : STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019



2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang didukung oleh sumber daya manusia yang berada di kecamatan dan kelurahan, seperti pada tabel berikut :

Tabel. 2.1
Data Pegawai ASN, Pegawai Honoror, Tenaga Harian Lepas (THL)
di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Timur

No	Uraian	Lk	Pr	Jumlah
1.	Camat	1	-	1 orang
2.	Sekretaris Camat	1	-	1 orang
3.	Kepala Seksi di Kecamatan	3	1	4 orang
4.	Kasubbag di Kecamatan	-	2	2 orang
5.	Fungsional Umum di Kecamatan	9	6	10 orang
6.	Tenaga Honoror	-	2	2 orang
7.	Tenaga Harian Lepas Kecamatan:			
	- Operator	2	1	3 orang
	- Penjaga Kantor	2	-	2 orang
	- Sopir	2	-	2 orang
	- Petugas kebersihan Kantor	1	1	2 orang
8.	Lurah	8	-	8 orang
9.	Sekretaris Lurah	2	6	8 orang
10	Kasi di Kelurahan	9	15	24 orang
11	Fungsional Umum di Kelurahan	5	3	19 orang
12	Tenaga Harian Lepas di Kelurahan			
	- Operator	2	6	8 orang
	- Penjaga Kantor	8	-	8 orang
	- Petugas Kebersihan Kantor	2	6	8 orang
	Total	57	49	106 orang

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Timur, Februari 2023

Berdasarkan Tabel di atas dapat dirinci personil/pegawai yang ada di kecamatan dan kelurahan keadaan Februari 2023 (tidak termasuk THL Kebersihan Lingkungan), sebagai berikut:

1. Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 35 personil yakni: ASN 25 orang, Tenaga Honorer 2 orang, THL Operator Komputer 3 orang, THL Kebersihan Kantor 2 orang, THL Penjaga Kantor 2 orang, dan THL Sopir 2 orang.
2. Kelurahan Ganting sebanyak 10 personil yakni : ASN 7 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang.
3. Kelurahan Sigando sebanyak 8 personil yakni : ASN 5 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang.
4. Kelurahan Ekor Lubuk sebanyak 9 personil yakni : ASN 6 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang.
5. Kelurahan Ngalau sebanyak 9 personil yakni : ASN 6 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang
6. Kelurahan Guguk Malintang sebanyak 8 personil yakni : ASN 5 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang
7. Kelurahan Tanah Pak Lambik sebanyak 9 personil yakni : ASN 6 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang
8. Kelurahan Koto Panjang sebanyak 10 personil yakni : ASN 7 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang
9. Kelurahan Koto Katik sebanyak 9 personil yakni : ASN 6 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang

Tabel 2.2
Data Kepegawaian Menurut Golongan

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Golongan IV	-	-	-
2	Golongan III	42 orang	22 orang	64 orang
3	Golongan II	6 orang	5 orang	11 orang
4	Golongan I	-	1 orang	1 orang

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Timur, Desember 2022

Tabel 2.3
Data Kepegawaian Menurut Eselon

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Eselon III	1 orang	-	1 orang
2	Eselon IV.a	11 orang	2 orang	13 orang
3	Eselon IV.b	11 orang	23 orang	34 orang

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Timur, Desember 2022

Tabel 2.4
Data Kepegawaian Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Strata II	3 orang	-	3 orang
2	Strata I	27 orang	16 orang	43 orang
3	Diploma III	2 orang	1 orang	3 orang
5	Diploma IV	1 orang	-	1 orang
4	SLTA	12 orang	11 orang	23 orang
6	SLTP	2 orang	-	2 orang
7	SD	-	1 orang	1 orang

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Timur, Desember 2022

Tabel 2.5
Data Kepegawaian Menurut Diklat Yang Diikuti

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Diklat Perjenjangan Sepala/ADUM/Kepemimpinan Tingkat IV	9 orang	10 orang	19 orang

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Timur, Desember 2022

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Padang Panjang Timur dilengkapi dengan aset yang terdiri atas peralatan dan perlengkapan. Adapun aset yang dimiliki Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.6
Sarana Prasarana Kecamatan Padang Panjang Timur

No	Uraian	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah	Kondisi		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Kendaraan Dinas Roda 4	3	-	3 unit	-	-	-
2	Kendaraan Dinas Roda 2	9	35	44 unit	34	1	-
3	Kendaraan Roda 3 (bentor)	-	8	8 unit	8	-	-
4	Gedung Kantor	1	8	9 unit	9	-	-
5	Meja Kerja ½ biro	20	56	76 bh	76	-	-
6	Meja Kerja Biro Eselon III	2		2 bh	2	-	-
7	Kursi Kerja (putar sandaran rendah)	11	24	36 bh	36	-	-
8	Kursi Kerja (putar sandaran tinggi)	1	8	9 unit	9	-	-
9	Kursi Rapat	110	200	310 bh	309	-	1
10	Komputer PC	12	24	34 unit	26	-	8
11	Laptop	6	9	14 unit	10	-	4
12	Printer	10	16	26 buah	21	1	4
13	Brankas	1	-	1 buah	1	-	-
14	Lemari arsip (kayu)	10	8	18 buah	18	-	-
15	Filling Cabinet	2	-	2 unit	1	-	1
16	Lemari Arsip (besi)	4	-	4 unit	4	-	-
17	Mesin Absen (Finger)	1	8	9 unit	9	-	-
18	Sofa	4	8	12 set	12	-	-
19	Bangku Tunggu	2	-	2 bh	2	-	-
20	Gordin/kry	25		25 bh	25	-	-
21	Sound System	2	8	10 set	2	-	4
22	Kamera DSLR	1	-	1 unit	-	-	1
23	Kamera Digital	2	-	2 unit		-	2
24	LCD Proyektor	2	3	5 set	5	-	-
25	Genset	2	8	10 bh	10	-	-
26	Tangga Lipat	2	-	2 buah	2	-	-

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Timur 2022

Sarana dan prasarana yang dimiliki sebagaimana tergambar pada tabel diatas secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Bappeda Kota Padang Panjang. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra Perangkat Daerah, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis. Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

Pengukuran capaian kinerja pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dapat di ukur dengan menunjukan tingkat capaian kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah Kecamatan Padang Panjang Timur.

Untuk pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur dapat dilihat pada lampiran Tabel 2.7 (TC-23) dan Tabel 2.8 (TC-24) sebagai berikut :

Tabel 27 (TC 23)

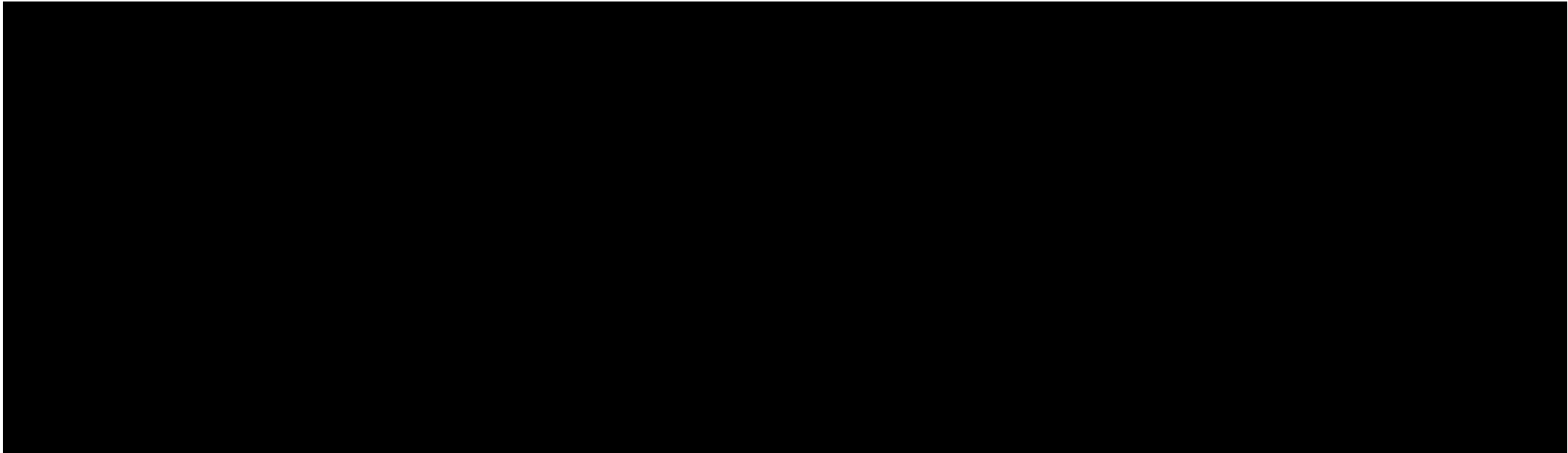
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TUJUAN																		
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif				100%	70%	75%	91%	93%	100%	70.73%	84.15%	98%	100%	100%	101.04%	112.20%	107.69%	107.53%
	SASARAN																		
	Persentase realisasi anggaran SATIMISAKE				85%	85%	87%	89%		85%	87%	89.46%	94.89%		100%	102.35%	102.83%	106.62%	
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan dan Kelurahan				31.01%	31.52%	33.93%	35.00%	37.00%	31.01%	31.52%	33.93%	38.07%	38.28%	100.00%	100.00%	100.00%	108.77%	103.46%
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				na	83.9	88.97	89.25	89.5	na	83.90	88.97	97.80	98.09	na	100%	100%	110%	110%
	PROGRAM sesuai Permen 13																		
1	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara				46	46	55			46	46	55			100%	100%	100%		
2	Jumlah tenaga THL yang dibayarkan gajinya (sopir, cs, penjaga kantor)				21	21	21			21	21	21			100%	100%	100%		
3	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan				1450	1523	1250			1450	1523	1250			100%	100%	100%		
4	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan				25	22	15			25	22	15			100%	100%	100%		
5	Jumlah tenaga THL operator dan PH yang dibayarkan gajinya				12	12	12			12	12	12			100%	100%	100%		
6	Jumlah jenis Cetak Dokumen dan Jasa Surat Menyurat				4	4	4			4	4	4			100%	100%	100%		
7	Jumlah rekening Listrik, air dan telepon yang dibayarkan				34	34	34			34	34	34			100%	100%	100%		
8	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan				0	-	9			0	-	9			0%	0%	100%		
9	Jumlah Gedung dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara				110	110	109			110	110	109			100%	100%	100%		
10	Jumlah tingkatan sekolah yang dinilai				4	4	-			4	4	-			100%	100%	0%		
11	Jumlah rapat dan monev yang dilaksanakan FKPM				12	12	6			12	12	6			100%	100%	100%		
12	Jumlah hari besar yang dilaksanakan (Peringatan HUTRI dan HUT Kota)				2	2	1			2	2	1			100%	100%	100%		
13	Jumlah kegiatan Operasional Sistem Informasi Pelayanan Publik				1	1	-			1	1	-			100%	100%	0%		
14	Jumlah rapat Forkopimca yang dilaksanakan				6	6	4			6	6	4			100%	100%	100%		

15	Jumlah Operasional Persampahan, Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum yang dilaksanakan				8	8	8			8	8	8			100%	100%	100%		
16	Jumlah pemenang Lomba Pendamping KUBE FM				3	3	-			3	3	-			100%	100%	0%		
17	Jumlah Kader Posyandu yang dibayarkan honorinya				190	190	190			190	190	190			100%	100%	100%		
18	Jumlah Kader Dasawisma yang dibayarkan honorinya				200	200	230			200	200	230			100%	100%	100%		
19	Jumlah pemenang Lomba Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kes				3	3	-			3	3	-			100%	100%	0%		
20	Jumlah RT yang difasilitasi				100	100	103			100	100	103			100%	100%	100%		
21	Jumlah lembaga LPM yang difasilitasi				9	9	9			9	9	9			100%	100%	100%		
22	Jumlah Posyantek yang di fasilitasi				1	1	1			1	1	1			100%	100%	100%		
23	Jumlah lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)				9	9	9			9	9	9			100%	100%	100%		
24	Jumlah Forum Komunikasi Kecamatan/Kelurahan Sehat yang difasilitasi				9	9	9			9	9	9			100%	100%	100%		
25	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Pemberdayaan Masyarakat				1	1	1			1	1	1			100%	100%	100%		
26	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan				2	2	2			2	2	2			100%	100%	100%		
27	Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				8	8	8			8	8	8			100%	100%	100%		
28	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8	8	8			8	8	8			100%	100%	100%		
29	Jumlah musholla yang dikunjungi tim ramadhan kecamatan				8	8	8			8	8	8			100%	100%	100%		
30	Jumlah kegiatan MTQ yang dilaksanakan				-	1	-			-	1	-			0%	100%	0%		
31	Jumlah lembaga Karang Taruna yang difasilitasi				9	9	9			9	9	9			100%	100%	100%		

PROGRAM PERUBAHAN (sesuai Permendagri 90/2019)																					
I	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi							100.00	90.00					100.00	100.00					100%	111%
	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah							100.00	100.00					100.00	100.00					100.00%	100.00%
	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan							76 org	77 org					76 org	77 org					100.00%	100.00%
	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian							0.00	0.00					0.00	0.00					0.00%	0.00%
	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia							0.00	0.00					0.00	0.00					0.00%	0.00%
	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran							90.00	90.00					90.00	100.00					100.00%	111.11%
	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan							10 jenis	10 jenis					10 jenis	10 jenis					100.00%	100.00%
	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan, Jumlah Retribusi sampah yang dibayarkan di kecamatan dan kelurahan							40 jenis, 12 bln	40 jenis, 12 bln					40 jenis, 12 bln	40 jenis, 12 bln					100.00%	100.00%
	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan							9 jenis	9 jenis					6 jenis	9 jenis					66.67%	100.00%
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti, Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan							20 kali, 1258 ok	20 kali, 1258 ok					20 kali, 1973 ok	20 kali, 1695 ok					156.84%	134.74%
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur							90.00	90.00					100.00	100.00					111.11%	111.11%
	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan							0.00	0.00					0.00	0.00					0.00%	0.00%
	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan							0.00	0.00					0.00	0.00					0.00%	0.00%
	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan							0.00	8 unit					0.00	8 unit					100.00%	100.00%
	Jumlah gedung kantor yang diadakan (mushola kantor camat)							0.00	0.00					0.00	0.00					0.00%	0.00%
	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah							100.00	100.00					100.00	100.00					100.00%	100.00%
	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan							1 jenis	1 jenis					1 jenis	1 jenis					100.00%	100.00%
	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan							34 rekening	27 rekening					34 rekening	27 rekening					79.41%	100.00%
	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan, Jumlah Tenaga Honoror yang dibayarkan							35 org	35 org					34 org	35 org					97.14%	97.22%
	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah							90.00	90.00					100.00	100.00					111.11%	111.11%
	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (thn 2021 kend dinas 8 kel)							35 unit	0.00					35 unit	0.00					100.00%	0.00%
	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara							12 unit	48 unit					12 unit	48 unit					100.00%	102.13%
	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (untuk 2021 termasuk 7 unit gedung yg dipelihara di 7 kel)							100 unit	100 unit					107 unit	108 unit					107.00%	108.00%
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara (utk thn 2021 gdg yg dipelihara 2 unit kec + kel ngalau)							2 unit	10 unit					2 unit	7 unit					100.00%	70.00%
II	Persentase Tingkat Layanan							100%	100%					100%	100%					100%	100%
	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan							12 kali	0					12 kali	-					100%	0.00%
	Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan (thn 2021 kel. Ganting)							1 kel	-					1 kel	-					100%	0.00%
	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan							48 kali	48 kali					48 kali	48 kali					100%	100.00%
	Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan							7 kel	8 kel, 48 org, 8 unit					7 kel	8 kel, 48 org, 8 unit					100%	100.00%

	Jumlah Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan							5 urusan	7 urusan					5 urusan	5 urusan				100%	100%
	Jumlah Forum Komunikasi Kecamatan dan Pokja Sehat							9	9					9	9				100%	100.00%
	Jumlah Lembaga PKK yang diberdayakan (2021 terletak di sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)							9	9					9	9				100%	100.00%
	Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan							9	9					9	9				100%	100.00%
	Jumlah Kader Posyandu yang dibayarkan honorinya							190	190					190	190					
	Jumlah Kader Dasawisma yang dibayarkan honorinya (2021 terletak di sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)							281	281					281	281				100%	100.00%
	Jumlah Tingkatan Sekolah yang dibina dan pemenang LSS tingkat kecamatan								4, 12						0				0%	0.00%
	Jumlah kegiatan yang diperlombakan KKG PKK KB Kes (2021 terletak di sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)								3						0				0%	0.00%
	Jumlah Pemenang KUBE FM							0	0					0	0				0%	0.00%
	Jumlah kegiatan Forum Anak yang terfasilitasi							0	0					0	0				0%	0.00%
	Jumlah kegiatan Forum Literasi yang terfasilitasi							0	0					0	0				0%	0.00%
	Jumlah Himpaudi yang diFasilitasi							0	0					0	0				0%	0.00%
III	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan							21.78%	22.17%					25.17%	39.97%				116%	180.29%
	Jumlah jenis pemberdayaan desa/kelurahan yang dilaksanakan							8 keg	-					8 keg	-				100%	0.00%
	jumlah kegiatan musrenbang kelurahan yang dilaksanakan (tahun 2021 musren 8 kelurahan)							8 keg	-					8 keg	-				100%	0.00%
	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan							5 jenis	6 jenis					5 jenis	6 jenis				100%	75.00%
	jumlah musrenbang yang dilaksanakan (utk 2021 hanya musren kecamatan)							1 keg	9 keg					1 keg	9 keg				100%	100.00%
	Jumlah kegiatan sarana prasarana yang dilaksanakan (untuk 2021 keg pengadaan alat studio gantung TV)							1 keg	-					1 keg	-				100%	0.00%
	Jumlah peserta yang dilatih							200	229					160	200				80%	87.34%
	Jumlah lembaga LPM yang diberdayakan (2021 LPM terletak di sub keg Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan)							9	9					9	9				100%	100.00%
	Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan							0	3					0	0				0%	0.00%
	Jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi							0	3					0	3				0%	100.00%
	Jumlah Lembaga Posyantek yang diberdayakan							2	9					2	9					100.00%
	Jumlah Lembaga Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) yg dilaksanakan							0	0					0	1					0.00%
	Jumlah RT (thn 2021 termasuk LPM)							103 RT	106 RT					103 RT	105 RT				100%	99.06%
	Jumlah jenis kegiatan RT yang dilaksanakan (untuk 2021 termasuk LPM)							6 keg	6 keg					6 keg	6 keg				100%	100.00%



Tabel 28 (TC 24)

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Anggaran	Realisasi
		2	3	4	5	6	11	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM awal (sesuai Permen 13)																	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,196,863,300	1,668,471,600				1,932,161,945	957,357,171				0.88	0.57				-24.05%	-50.45%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	431,993,000	270,000,000				397,435,000	148,980,500				0.92	0.55				-37.50%	-62.51%
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	95,000,000					94,200,000				0.99						-100.00%	-100.00%
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1,750,000					1,750,000				1.00						-100.00%	-100.00%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN	2,777,831,000	1,638,433,000				190,479,350	1,147,157,510				0.07	0.70				-41.02%	502.25%
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN CAMAT	10,100,000					9,210,250				0.91						-100.00%	-100.00%
7	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KECAMATAN/KELURAHAN	3,239,222,000					3,089,509,725				0.95						-100.00%	-100.00%
8	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN/KELURAHAN	3,022,950,000	7,986,612,300				1,246,330,385	4,385,781,850				0.41	0.55				164.20%	251.90%
9	PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	3,127,535,500					2,390,112,490				0.76						-100.00%	-100.00%
	PROGRAM PERUBAHAN (sesuai Permen 90)																	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11,545,107,512	11,955,260,795	11,582,161,237			11,031,729,441	11,534,537,524				0.96	0.96	0.00	0.22%	4.56%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9,409,039,963	9,852,691,312	9,496,041,686			9,124,560,918	9,652,638,957				0.97	0.98	0.00	0.55%	5.79%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9,409,039,963	9,852,691,312	9,496,041,686			9,124,560,918	9,652,638,957				0.97	0.98	0.00	0.55%	5.79%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah			518,415,900	511,669,850	414,320,300			465,912,817	449,403,593				0.90	0.88	0.00	-10.16%	-3.54%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			35,306,700	32,621,700	23,102,300			33,625,900	31,659,500				0.95	0.97	0.00	-18.39%	-5.85%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			180,160,750	175,804,400	140,084,300			159,679,700	166,404,150				0.89	0.95	0.00	-11.37%	4.21%

	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan			57,513,800	50,862,250	41,033,700			46,021,750	38,221,700				0.80	0.75	0.00	-15.44%	-16.95%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			245,434,650	252,381,500	210,100,000			226,585,467	213,118,243				0.92	0.84	0.00	-6.96%	-5.94%
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68,000,000	-				68,000,000				0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin				68,000,000	-				68,000,000				0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,120,854,149	1,144,355,033	1,117,801,781			1,038,019,975	1,069,081,971				0.93	0.93	0.00	-0.11%	2.99%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6,560,000	6,290,000	2,400,000			4,837,000	4,648,000				0.74	0.74	0.00	-32.98%	-3.91%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik			89,577,349	84,029,033	91,864,981			57,977,278	60,353,363				0.65	0.72	0.00	1.57%	4.10%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1,024,716,800	1,054,036,000	1,023,536,800			975,205,697	1,004,080,608				0.95	0.95	0.00	-0.02%	2.96%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			496,797,500	378,544,600	553,997,470			403,235,731	295,413,003				0.81	0.78	0.00	11.27%	-26.74%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan			100,369,000					74,786,900					0.75	0.00	0.00	0.00%	-100.00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			84,244,500	200,822,100	155,957,470			76,049,876	167,945,800				0.90	0.84	0.00	58.02%	120.84%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			209,288,000	87,952,500	81,460,000			169,329,300	58,334,500				0.81	0.66	0.00	-32.68%	-65.55%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			102,896,000	89,770,000	316,580,000			83,069,655	69,132,703				0.81	0.77	0.00	119.95%	-16.78%

II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,640,675,750	3,780,676,250	3,716,157,550			2,508,580,560	3,636,844,995				0.95	0.96	0.00	20.73%	44.98%
6	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			213,409,350	-	-			207,675,800	-				0.97	0.00	0.00	0.00%	-100.00%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Persampahan + Bentor Kel. Ganting 2021)			213,409,350	-	-			207,675,800	-				0.97	0.00	0.00	0.00%	-100.00%
7	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum			1,493,619,900	1,612,820,050	1,609,653,000			1,460,305,360	1,585,773,452				0.98	0.98	0.00	3.89%	8.59%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Persampahan+Bentor 7 Kel 2021) 8 KEL 2022			1,493,619,900	1,612,820,050	1,609,653,000			1,460,305,360	1,585,773,452				0.98	0.98	0.00	3.89%	8.59%
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat			933,646,500	2,167,856,200	2,106,504,550			840,599,400	2,051,071,543				0.90	0.95	0.00	64.68%	144.00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (KT, FKKS, UKS, Posyandu 2021)			933,646,500	-	-			840,599,400	-				0.90	0.00	0.00	0.00%	-100.00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (FKKS,Pokja Sehat, PKK, KT, Posyandu, Dasawisma, UKS, HGG PKK KB Kes, Forum Anak, Forum Literasi, Himpaud 2022)			-	2,167,856,200	2,106,504,550			-	2,051,071,543				0.00	0.95	0.00	0.00%	#DIV/0!
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			3,925,914,850	2,814,103,200	2,915,527,576			3,764,708,125	2,752,234,381				0.96	0.98	0.00	-12.36%	-26.89%
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			83,162,450	-	-			72,945,600	-				0.88	0.00	0.00	0.00%	-100.00%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Musrenbang 8 Kel)			83,162,450	-	-			72,945,600	-				0.88	0.00	0.00	0.00%	-100.00%
10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1,563,387,900	645,362,200	612,568,576			1,437,710,500	589,295,381				0.92	0.91	0.00	-31.90%	-59.01%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Musrenbang Kecamatan)			38,937,400	121,181,400	97,596,400			35,275,400	116,699,400				0.91	0.96	0.00	95.88%	230.82%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (TV Ganting 2021)			28,233,850	-	-			28,135,000	-				1.00	0.00	0.00	0.00%	-100.00%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dasawisma, PKK, Posyantek 2021)			1,496,216,650	-	-			1,374,300,100	-				0.92	0.00	0.00	0.00%	-100.00%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pelatihan, LPM,BBGRM, Kel berprestasi, Posyantek, Forikan 2022)			-	524,180,800	514,972,176			-	472,595,981				0.00	0.90	0.00	0.00%	0.00%

11	Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Lembaga			2,279,364,500	2,168,741,000	2,302,959,000			2,254,052,025	2,162,939,000			0.99	1.00	0.00	0.67%	-4.04%
	Penyelenggaraan Masyarakat (2022 RT) (2021 RT, LPM)	Lembaga			2,279,364,500	2,168,741,000	2,302,959,000			2,254,052,025	2,162,939,000			0.99	1.00	0.00	0.67%	-4.04%
IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				414,868,400	26,675,000	24,971,000			155,794,300	22,987,450			0.38	0.86	0.00	-49.98%	-85.24%
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum				414,868,400	26,675,000	24,971,000			155,794,300	22,987,450			0.38	0.86	0.00	-49.98%	-85.24%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (2022 FKPM) (2021FKPM, keg Posko Satgas Covid-19)				414,868,400	26,675,000	24,971,000			155,794,300	22,987,450			0.38	0.86	0.00	-49.98%	-85.24%
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				42,242,500	426,621,450	47,759,700			32,111,450	357,851,905			0.76	0.84	0.00	410.56%	1014.41%
13	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				42,242,500	426,621,450	47,759,700			32,111,450	357,851,905			0.76	0.84	0.00	410.56%	1014.41%
	Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (2021Tim Ramadhan) (2022 keg tim ramadhan, mtq kec, mtq kota)				33,042,500	365,261,450	38,320,000			23,245,000	315,376,730			0.70	0.86	0.00	457.96%	1256.75%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (2021 forkopimca, hutri) (2022 forkopimca, hutri, hutkota)				9,200,000	61,360,000	9,439,700			8,866,450	42,475,175			0.96	0.69	0.00	241.17%	379.06%

Berdasarkan tabel diatas tahun 2019-2022 Kecamatan Padang Panjang Timur telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 rata-rata mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut :

- b. Untuk tahun 2019 Kecamatan Padang Panjang Timur telah melaksanakan 9 program dan 46 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 21.975.494.800,- (termasuk gaji dan tunjangan) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.717.376.010,- (termasuk gaji dan tunjangan) atau 85,17% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- c. Tahun 2020 Kecamatan Padang Panjang Timur telah melaksanakan 4 program dan 30 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 21.601.304.650 (termasuk gaji dan tunjangan) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.102.055.804,- (termasuk gaji dan tunjangan) atau 93,06 % dan realisasi fisik sebesar 100%.
- d. Pada tahun 2021-2022 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
Tahun 2021 Kecamatan Padang Panjang Timur melaksanakan 5 program, 12 kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.18.568.809.012,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.492.923.876,- atau 94,21% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- e. Tahun 2022 Kecamatan Padang Panjang Timur telah melaksanakan 5 program, 11 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 19.003.336.695,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.304.456.255,- atau 96,32% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Adapun kinerja pelayanan di Kecamatan Padang Panjang Timur, adalah :

1. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari;
2. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Daerah maupun pihak lainnya;
3. Pembinaan kelengkapan administrasi kelurahan dan kecamatan;
4. Pembinaan secara rutin ke Kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
5. Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di kelurahan;
6. Memberikan fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan kelurahan;
7. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
9. Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Kecamatan;
10. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

“PATEN” merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Mitra kecamatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat seperti Polsek dan Koramil, kedua mitra ini sebagai anggota dari Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam). Pembentukan Forkopimda /Forkopimcam diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut, khususnya Pasal 1 Ayat 18 dan Pasal 26 Ayat 1-6 diatur sebuah forum serupa dengan Muspida/Muspika yang dinamai Forkopimda/ Forkopimcam.

Keanggotaan Forkopimcam berasal dari 3 unsur sebagai berikut:

1. Camat, sebagai ketua
2. Kepolisian di wilayah Kecamatan yaitu Polsek, sebagai anggota

3. Pimpinan Kewilayahan TNI di Kecamatan yaitu Koramil, sebagai anggota.

Tugas dan fungsi secara yuridis, forum koordinasi pimpinan daerah dan kecamatan membantu pemerintah daerah dan kecamatan dalam membahas dan melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah kerjanya. Pembentukan forum dan sekretariat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dikoordinatori oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup wilayah kerjanya ini, bertujuan untuk dapat menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan. Sehingga keberadaan Forkopimcam diharapkan benar-benar mampu mempercepat penyelesaian permasalahan urusan pemerintahan umum di kecamatan yang bersifat multidimensi dan memerlukan penanganan yang cepat.

Adapun tugas dari Polsek sebagai anggota Forkopimca yaitu menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk Komando Rayon Militer (Koramil) yakni bertugas menjaga keutuhan wilayah kecamatan dari segala gangguan dan ancaman, baik itu yang datang dari luar maupun dari dalam.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Padang Panjang Timur ada beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam hal partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dapat diidentifikasi permasalahannya, sebagai berikut :

- Belum optimalnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
- Belum optimalnya koordinasi implementasi kebijakan pemerintah.

2. Layanan Publik

Dalam hal pelayanan publik dapat diidentifikasi permasalahan yaitu:

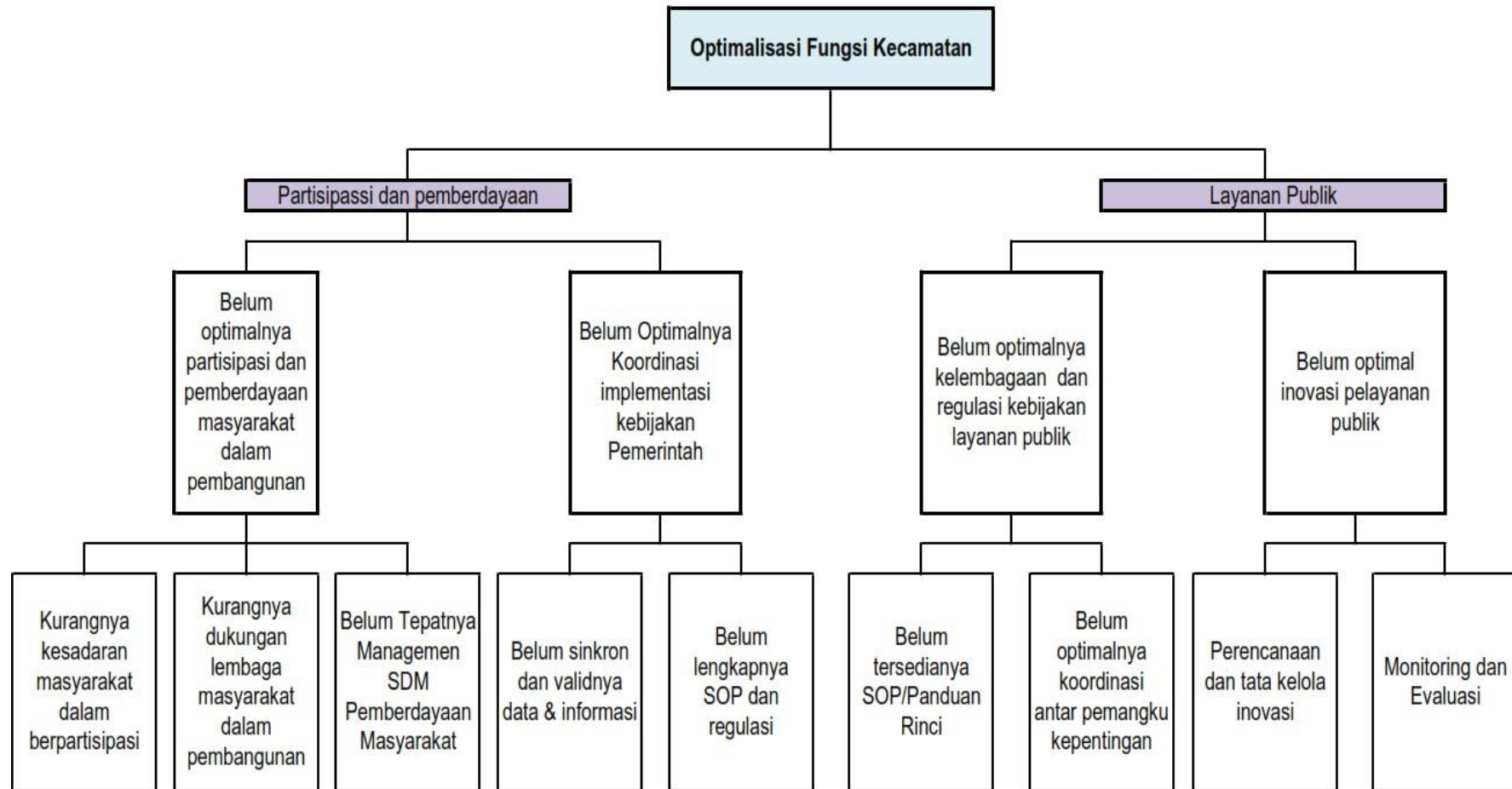
- Belum optimalnya kelembagaan dan regulasi kebijakan layanan publik;
- Belum optimalnya inovasi pelayanan publik.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel 3.1, berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat	Belum optimalnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi
			Masih kurangnya dukungan lembaga masyarakat dalam pembangunan
			Belum Tepatnya Managemen SDM Pemberdayaan Masyarakat
		Belum Optimalnya Koordinasi implementasi kebijakan Pemerintah	Belum sinkron dan validnya data & informasi
			Belum lengkapnya SOP dan regulasi
2	Layanan Publik	Belum optimalnya kelembagaan dan regulasi kebijakan layanan publik	Belum tersedianya SOP/Panduan Rinci
			Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan
		Belum optimalnya inovasi pelayanan publik	Perencanaan dan tata kelola inovasi
			Monitoring dan Evaluasi

GAMBAR 3
POHON MASALAH KECAMATAN



Pada Tahun 2019-2022 Kecamatan Padang Panjang Timur telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 rata-rata mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Untuk tahun 2019 Kecamatan Padang Panjang Timur telah melaksanakan 9 program dan 46 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 21.975.494.800,- (termasuk gaji dan tunjangan) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.717.376.010,- (termasuk gaji dan tunjangan) atau 85,17% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- b. Tahun 2020 Kecamatan Padang Panjang Timur telah melaksanakan 4 program dan 30 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 21.601.304.650 (termasuk gaji dan tunjangan) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.102.055.804,- (termasuk gaji dan tunjangan) atau 93,06 % dan realisasi fisik sebesar 100%.
- c. Dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, maka untuk tahun 2021-2023 program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator sub mengikuti klasifikasi, kodefikasi berdasarkan Kepmen nomor 050-5889 tahu 2021.
- d. Tahun 2021 Kecamatan Padang Panjang Timur melaksanakan 5 program, 12 kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.18.568.809.012,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.492.923.876,- atau 94,21% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- e. Dan tahun 2022 Kecamatan Padang Panjang Timur telah melaksanakan 5 program, 11 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 19.003.336.695,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.304.456.255,- atau 96,32% dan realisasi fisik sebesar 100%.

3.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang bagi daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan secara signifikan.

Sebagaimana diutarakan di atas, maka isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan dasar dalam menentukan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan datang. Selain itu, isu strategis juga berkaitan dengan permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada perencanaan tahun sebelumnya dan akan berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan selanjutnya. Oleh sebab itu maka perlu upaya untuk mengatasinya. Berikut ini, dirumuskan isu strategis pembangunan pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan melihat keterkaitannya dengan kebijakan pembangunan yang akan ditangani melalui Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024-2026 adalah :

1. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan yang bersangkutan. dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat ini terus menerus di tingkatkan. Adanya konsep yang tepat dalam pelibatan dan penumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharannya.

2. Layanan Publik

Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat di kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah kota yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani, sesuai kewenangan yang di berikan kepada masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan dan kelurahan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR TAHUN 2024-2026

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Kecamatan Padang Panjang Timur yang telah dituangkan pada Bab III, serta tugas pokok dan fungsi kecamatan maka dirumuskan tujuan dan sasaran tahun 2024-2026, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dalam kurun waktu tiga tahun kedepan, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024–2026 yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagai penunjang urusan pemerintah. Seiring perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dinamika kebijakan, regulasi di bidang perencanaan dan penganggaran mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas.

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kota Padang Panjang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk tujuan dan sasaran selama kurun waktu tiga tahun kedepan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagai penunjang urusan pemerintah, maka **Tujuan** Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang dirumuskan dalam Renstra Tahun 2024-2026 adalah ***“Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”*** dengan **Sasaran** yang akan dicapai oleh Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dalam rangka pencapaian tujuan selama tahun 2024-2026 terdiri dari 2 (dua) Sasaran yaitu

1. ***“Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan;***
2. ***Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan”***

Adapun Tujuan dan Sasaran serta Indikator tujuan/sasaran beserta dengan target kinerja selama 3 (tiga) tahun yang akan datang tahun 2024-2026 dapat dilihat dalam Tabel 4.1 (TC-25) berikut ini:

TABEL 4.1 (TC-25)
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil Survey SKM (kuisisioner, aplikasi)	90.00	93.00	95.00
2		Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Perbandingan jumlah anggaran partisipasi dengan total belanja langsung kecamatan dan kelurahan	39.20%	39.50%	39.80%
3		Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Hasil Survey SKM (kuisisioner, aplikasi)	97.81	97.82	97.83

4.1.3 Penjelasan Tabel 4.1 “Tujuan” Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur

Tujuan Kecamatan Padang Panjang Timur yaitu ”**Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**” dengan Indikator Tujuan Kinerja ”Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik” dengan Definisi Operasional ”Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)”.

4.1.4 Penjelasan Tabel 4.1 “Sasaran” Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur terdiri dari 2 (dua) Sasaran Kinerja yaitu:

1. Meningkatnya Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan dengan Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan
 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan dengan Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
- Untuk mencapai Target **Sasaran Pertama** dengan Indikator Kinerja “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan Pada Kecamatan Padang Panjang Timur” dengan Definisi Operasional sebagai yaitu : “Perbandingan Jumlah Anggaran Partisipasi dengan Total Belanja Langsung Kecamatan dan Kelurahan”.

Dengan Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah anggaran partisipasi}}{\text{Total belanja langsung kecamatan dan kelurahan}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan anggaran belanja langsung pada kecamatan dan kelurahan yaitu keseluruhan anggaran belanja langsung pada kecamatan dan kelurahan pada tahun berjalan, sedangkan untuk anggaran partisipasi dihitung dengan perkiraan dana/anggaran partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan seperti:

- Kegiatan Gotong Royong lingkungan (rutin) masyarakat
- Kegiatan Poskamling
- Kegiatan Musrenbang
- Kegiatan Perlombaan-perlombaan
- Kegiatan Keolahragaan

- Kegiatan Rapat-rapat
 - Kegiatan di Desa Wisata Kubu Gadang
 - Dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat
- Untuk **Sasaran Kedua** dengan Indikator Kinerja yaitu “Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan Padang Panjang Timur” dengan Definisi Operasional berupa hasil survey kepuasan masyarakat melalui kuesioner yang diisi langsung oleh masyarakat.

Dengan rumus :

Total Nilai Interval Konversi (NIK) x 25

Berikut adalah hasil penilaian SKM Tahun 2021 :

Total NIK tahun 2021 = 3,912 x 25 = 97,80 / SANGAT BAIK

TABEL 4.2
PERHITUNGAN NILAI SKM
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2021

No	Unsur Pelayanan	Nilai Total Per Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan	Nilai Interval Konversi (NIK)
1	Pemenuhan persyaratan pelayanan	120	4.000	0.235
2	Kemudahan prosedur pelayanan	120	4.000	0.235
3	Lamanya waktu penyelesaian pelayanan	120	4.000	0.235
4	Ketepatan waktu jadwal pelayanan	120	4.000	0.235
5	Kemahalan biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditetapkan	120	4.000	0.235
6	Kesesuaian hasil pelayanan dengan yang diharapkan	120	4.000	0.235
7	Kedisiplinan petugas selama proses pelayanan berlangsung	120	4.000	0.235
8	Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan	120	4.000	0.235
9	Komunikasi petugas layanan	120	4.000	0.235
10	Kemampuan dan keterampilan petugas dalam melayani	120	4.000	0.235
11	Kemudahan mendapatkan informasi setiap jenis layanan yang ada	120	4.000	0.235
12	Keberadaan unit pengaduan pelayanan	76	2.533	0.149
13	Kelengkapan sarana pelayanan (komputer, printer, lemari, dokumen, dll)	120	4.000	0.235
14	Kelengkapan sarana pendukung pelayanan (kursi ruang tunggu, kipas angin, tempat sampah, dll)	120	4.000	0.235
15	Kelengkapan prasarana pelayanan (bangunan kantor : ruang tunggu, ruang layanan, kantor, dll)	120	4.000	0.235
16	Kelengkapan prasarana pendukung pelayanan (tempat parkir, toilet, mushala, dll)	120	4.000	0.235
17	Kebersihan lingkungan layanan yang ada	120	4.000	0.235
	TOTAL	1996	66.533	3.912
	Total Nilai Interval Konversi (NIK)	3.912		
	Total Nilai Interval Konversi (NIK) x 25	97.80		
	Mutu Pelayanan	A		
	Kinerja Unit Pelayanan	Sangat Baik		

Laporan : Hasil SKM Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas, 2021

Pada tahun 2022 Target yang ditetapkan sebesar 97,80 dengan realisasi sebesar 98,09 dan persen capaian sebesar 100,30% artinya nilai survey kepuasan masyarakat yang berhasil dicapai Kecamatan Padang Panjang Timur dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bernilai “Sangat Baik” bila dibandingkan dengan angka realisasi tahun lalu (2021) yaitu sebesar 97,80.

Tabel 4.3

Tabel Perhitungan Nilai SKM						
Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang						
Tahun 2022						
No	Unsur Pelayanan	Per Unsur Pelayanan	Rata-Rata Per Unsur Pelayanan	Interval konversi IKM	IKM Per Unsur	Kinerja Per Unsur Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelayanan (Unsur ke-1)	197	3.940	0.232	98.50	Sangat Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan (Unsur ke-2)	196	3.920	0.231	98.00	Sangat Baik
3	Waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian pelayanan (Unsur ke-3)	197	3.940	0.232	98.50	Sangat Baik
4	Ketepatan waktu jadwal pelayanan (Unsur ke-4)	192	3.840	0.227	96.00	Sangat Baik
5	Kemahalan biaya pelayanan yang dikeluarkan dalam pelayanan (Unsur ke-5)	200	4.000	0.236	100.00	Sangat Baik
6	Kesesuaian produk/hasil layanan dengan yang ditetapkan (Unsur ke-6)	198	3.960	0.234	99.00	Sangat Baik
7	Kemampuan petugas dalam melayani (Unsur ke-7)	194	3.880	0.229	97.00	Sangat Baik
8	Kedisiplinan petugas selama proses pelayanan berlangsung (Unsur ke-8)	198	3.960	0.234	99.00	Sangat Baik
9	Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan (Unsur ke-9)	198	3.960	0.234	99.00	Sangat Baik
10	Komunikasi petugas layanan (Unsur ke-10)	196	3.920	0.231	98.00	Sangat Baik
11	Kemudahan mendapatkan informasi setiap jenis layanan yang ada (Unsur ke-11)	195	3.900	0.230	97.50	Sangat Baik
12	Keberadaan unit pengaduan pelayanan (Unsur ke-12)	196	3.920	0.231	98.00	Sangat Baik
13	Kelengkapan sarana pelayanan (misal: komputer, printer, lemari dokumen, dll) (Unsur ke-13)	192	3.840	0.227	96.00	Sangat Baik
14	Kelengkapan sarana pendukung pelayanan (misal: kursi ruang tunggu, kipas angin, tempat sampah, dll) (Unsur ke-14)	197	3.940	0.232	98.50	Sangat Baik
15	Kelengkapan prasarana pelayanan (Bangunan kantor: ruang tunggu, ruang layanan, dll) (Unsur ke-15)	195	3.900	0.230	97.50	Sangat Baik
16	Kelengkapan prasarana pendukung pelayanan (misal: tempat parkir, toilet, mushala, dll) (Unsur ke-16)	192	3.840	0.227	96.00	Sangat Baik
17	Kebersihan lingkungan pelayanan yang ada (Unsur ke-17)	192	3.840	0.227	96.00	Sangat Baik
	TOTAL	3325	66.500	3.924	1662.50	
			Total Nilai Konversi IKM	3.924		
			Total Nilai Konversi IKM x 25	98.09		
			Mutu Pelayanan	A		
			Kinerja Unit Pelayanan	Sangat Baik		

(Sumber : Survey Kepuasa Masyarakat oleh Organisasi Setdako, 2022).

Adapun produk Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur yang diberikan kepada masyarakat sebanyak 8 (delapan) Layanan (2022), yaitu :

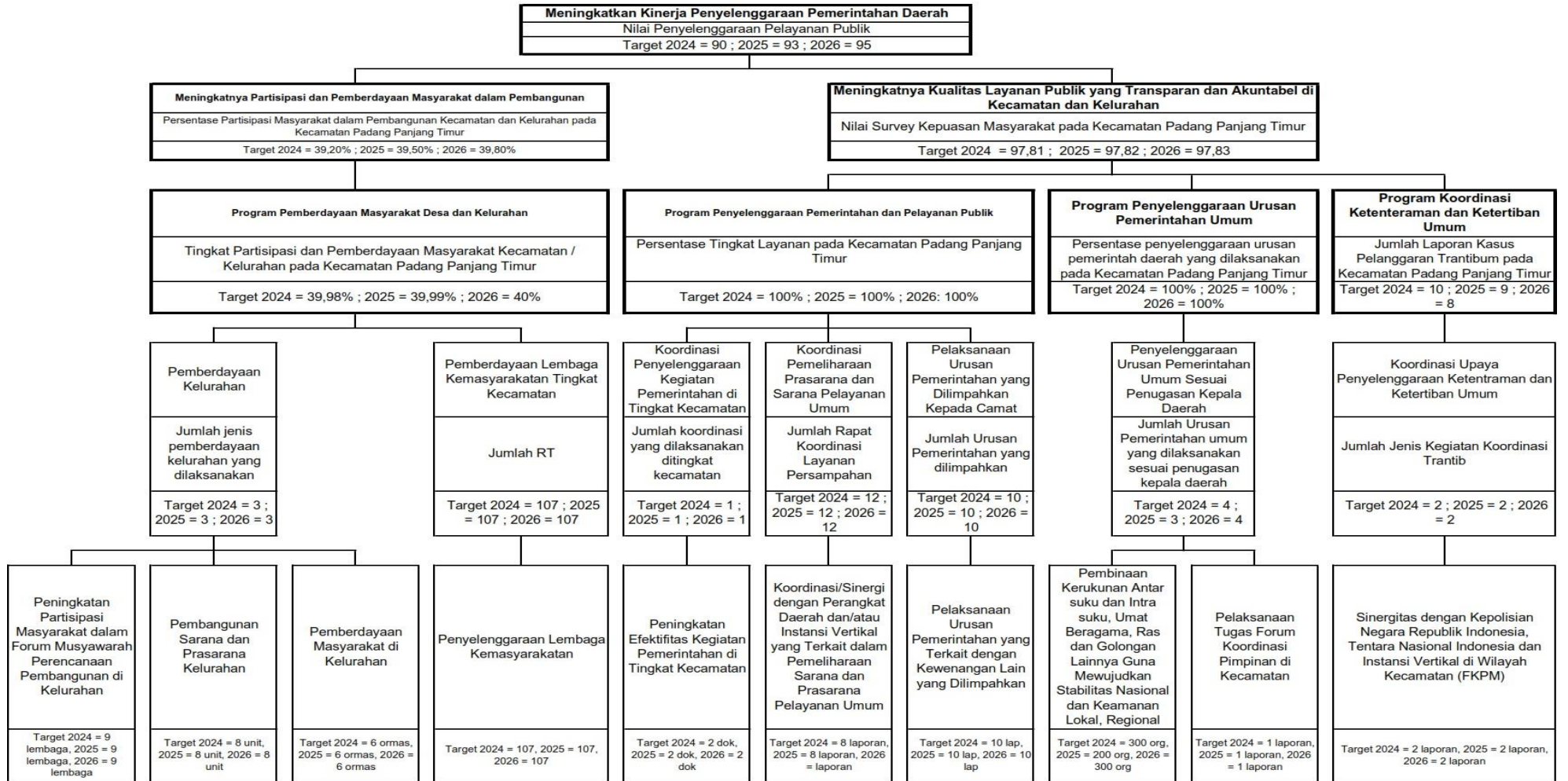
1. Dispensasi Nikah
 2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 3. Surat Keterangan Ahli Waris
 4. Surat Daftar susunan Keluarga (Pensiun PNS)
 5. Surat Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang (JKMPP)
 6. Surat Keterangan Tidak Mampu
 7. Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD)
- Surat Keterangan Domisili

4.2. CASCADING KINERJA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Penyusunan dan penetapan target capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024-2026 disesuaikan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dan merupakan tujuan, sasaran, indikator dan target capaian keberhasilan pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Secara lengkap untuk gambaran tujuan, sasaran, indikator serta program dapat dilihat pada Tabel Cascading RENSTRA Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, berikut ini :

Gambar 4
Cascading Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur
Tahun 2024 - 2026



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan strategi kebijakan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Padang Panjang Timur menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur serta kebijakan dalam Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024-2026, yang selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran Kecamatan Padang Panjang Timur tahun 2024-2026, maka untuk mencapainya telah ditetapkan 5 (lima) Strategi dan 6 (enam) Arah Kebijakan seperti pada Tabel 5.1 (TC-26), berikut ini :

TABEL 5.1 (TC-26)
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	PROGRAM
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah				
	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan/kelurahan	Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan banyak masyarakat	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		Meningkatkan Peran Serta Lembaga Masyarakat	Melakukan advokasi dan peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat	
			Memberikan reward kepada lembaga/organisasi yang aktif berpartisipasi	
	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan ketersediaan regulasi/panduan teknis	Menyiapkan SOP	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
		Meningkatkan tata kelola pelaksanaan inovasi	Penguatan SDM pelaksana inovasi	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
		Meningkatkan koordinasi pemangku kepentingan tingkat kecamatan	Meningkatkan koordinasi (kualitas dan kuantitas) FORKOPIMCA	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Dalam rangka pencapaian strategi dan arah kebijakan 3 tahun ke depan yaitu tahun 2024-2026, Kecamatan Padang Panjang Timur menetapkan 4 (empat) Program, 7 (tujuh) Kegiatan, dan 10 (sepuluh) Sub kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**, dengan indikator yaitu tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan:
 - Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.
 - Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan.
 - Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

- b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan:
- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.
2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** dengan indikator Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan sub kegiatan :
- Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat dengan sub kegiatan :
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.
3. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur, yang meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan :
- Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.
 - Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
4. **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum** dengan indikator Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Trantibum pada Kecamatan Padang Panjang Timur, yang meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan :
- Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran Kecamatan Padang Panjang Timur, serta strategi dan arah kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk periode 2024-2026, meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program dan kegiatan ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Kecamatan Padang Panjang Timur dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Keterkaitan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Padang Panjang Timur dapat dijelaskan pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1
Keterkaitan Kelompok Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024-2026

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait dalam

	Kecamatan dan Kelurahan		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Berdasarkan Program dan Kegiatan tersebut diatas, maka Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan:

- Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan. Pada sub kegiatan ini meliputi pelaksanaan kegiatan musrenbang di tingkat kecamatan dan musrenbang tingkat kelurahan.
- Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yakni meliputi kegiatan pemeliharaan/pengadaan sarana prasarana

fasilitas umum (fisik) yang ada diwilayah kecamatan/kelurahan berdasarkan usulan musrenbang dan pikir.

- Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Kegiatan pada sub ini meliputi kegiatan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat (non fisik), kegiatan kelembagaan seperti Posyantek/TTG, kegiatan LPM, kegiatan Forikan, kegiatan lomba Penilaian Kelurahan Berprestasi, dan BBGRM.
- b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan:
 - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan. Kegiatan pada sub ini yakni lembaga RT yang berjumlah 106 RT (2023) untuk wilayah Kecamatan Padang Panjang Timur.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum. Pada sub kegiatan ini meliputi kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yakni kebersihan lingkungan pada setiap kelurahan yang ada diwilayah Kecamatan Padang Panjang Timur.
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat dengan sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan : Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan. Kegiatan pada sub ini meliputi kegiatan kelembagaan yaitu Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, Pokja Kelurahan Sehat, PKK, Posyandu, Dasawisma, Karang Taruna, kegiatan Lomba Sekolah Sehat, lembaga Himpaudi, Forum Anak, dan Forum Literasi.

3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur, yang meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan

Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional. Pada sub kegiatan ini meliputi kegiatan Tim Safari Ramadan Kecamatan dan kegiatan pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan maupun tingkat kota.

- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan meliputi Kegiatan Rapat-rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) yaitu Camat beserta jajarannya bersama Polsek, Koramil dan FKPM yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas.

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, yang meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan meliputi kegiatan rapat-rapat dan monitoring Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).

Untuk lebih jelasnya program, kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 6.2 (TC.27) berikut ini.

TABEL 6.2 (TC 27)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUSAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB				
									TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	(Rp)		Target	(Rp)	Target	(Rp)
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)							
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR																					
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai NIK (Nilai Konversi) SKM dari 17 Unsur Pelayanan	Total Nilai Konversi SKM x 25	NILAI	85.00	90.00		93.00		95.00		95.00						
	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan			Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Perbandingan jumlah anggaran partisipasi dengan total belanja langsung kecamatan dan kelurahan	(Jumlah anggaran partisipasi / Total Belanja Langsung kecamatan dan kelurahan) x 100%	%	39%	39.20%		39.50%		39.80%		39.80%						
	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Hasil Survey SKM (kuisisioner, aplikasi)	Total Nilai Konversi SKM x 25	NILAI	97.80	97.81		97.82		97.83		97.83						
		70101		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Rata-rata Capaian Nilai Indikator Kegiatan pada Program Penunjang Urusan	(Jumlah Nilai Capaian Indikator Kegiatan/Jumlah Kegiatan) x 100%	%	100%	95	10,471,259,809	95	10,596,259,809	95	10,453,759,809	95	31,521,279,427				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata nilai survey Layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang terdiri dari: - Pembayaran gaji dan tunjangan - Verifikasi dan Pencairan anggaran kegiatan	Hasil Survey	%	100%	95	8,583,423,809	95	8,651,923,809	95	8,651,923,809	95	25,887,271,427				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUSAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB				
									TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	(Rp)		Target	(Rp)	Target	(Rp)
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)							
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan dalam setahun (14 bulan)	Jumlah ASN pada OPD X 14 bulan	orang	1078	1078	8,583,423,809	1078	8,651,923,809	1078	8,651,923,809	3234	25,887,271,427					
		7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rata-rata nilai survey layanan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah yang terdiri dari: - Kenaikan pangkat - KGB - Cuti - Penghargaan pegawai - Pensiun	Hasil Survey	%	100%	100	38,500,000	-	-	100	57,500,000	100	96,000,000					
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan untuk pegawai	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan untuk pegawai	paket	-	77	38,500,000	-	-	77	57,500,000	154	96,000,000					
		7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Rata-rata nilai survey layanan administrasi umum pada perangkat daerah yang terdiri dari: - penyediaan komponen Listrik - Penyediaan bahan logistik kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - penyediaan sarana/prasarana Rapat	Hasil Survey	%	100%	90	447,000,000	90	507,000,000	90	507,000,000	90	1,461,000,000					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan setiap triwulan (1 tahun = 4triw/paket)	(4 triw x 1 paket) x 9 unit kerja (kec dan kel) = 36 paket	paket	10	36	29,000,000	36	29,000,000	36	29,000,000	108	87,000,000					

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUSAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	(Rp)	
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan setiap triwulan (1 tahun = 4triw/paket)	(4 triw x 1 paket) x 9 unit kerja (kec dan kel) = 36 paket	paket	3	36	200,000,000	36	200,000,000	36	200,000,000	108	600,000,000	
		7 01 01 2.06 05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Setiap Bulan (1 tahun = 12 bulan)	(12 bln x 1 paket) x 9 unit kerja (kec dan kel) = 108 paket	paket	3	108	20,000,000	108	50,000,000	108	50,000,000	324	120,000,000	
		7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan per penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	KEC - 2 lap (lap rapat & perjalanan dinas) x 12 bulan = 24 lap KEL - 1 lap x 8 kel x 12 bln = 96 lap	laporan	29	120	198,000,000	120	228,000,000	120	228,000,000	360	654,000,000	
		7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		%	100%	100	190,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100.00	290,000,000		
		7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			unit	-	1 unit	5,000,000	-	-	0	-	1	5,000,000	
		7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas lapangan yang Disediakan			unit	-	-	-	9 unit	5,000,000	0	0	9	5,000,000	
		7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			unit	16	16 unit (komputer pc 8, printer 8)	185,000,000	10 unit	35,000,000	10 unit	40,000,000	36	260,000,000	
		7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			unit	-	-	-	1 unit (kel koto katik)	10,000,000	1 unit gedung mushola bertingkat	10,000,000	2	20,000,000	tanah yg sekarang belum hak milik pmda, butuh penganggaran

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUSAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	(Rp)	
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang terdiri dari: - Terpenuhinya urusan surat menyurat - Pembayaran listrik air dan telpon - Tersedianya pelayanan jasa umum kantor (Kebersihan, keamanan, tenaga administrasi/teknisi)	Jumlah poin terhadap pembayaran listrik, air dan telpon + jumlah poin terhadap pemenuhan proses surat menyurat + jumlah poin terhadap penyediaan jasa umum kantor. dengan poin sebagai berikut : :khusus OPD PPT - Terbayarnya listrik , air, telpon sesuai tagihan: 276 (23 tagihan x 12 bln) - terpenuhinya proses Surat menyurat: 600 lbr - Tersedianya jasa pelayanan umum kantor sesuai dengan perencanaan : 35	%	100	90	752,336,000	90	752,336,000	90	752,336,000	90	2,257,008,000	
		7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan yang memuat surat masuk dan surat keluar dalam 1 bulan	KEC = 1 lap x 12 bln	laporan	1	12	6,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	36	18,000,000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan tagihan pembayaran listrik dan air dalam 12 bulan	KEC = 48 lap KEL = 300 lap	laporan	1	348	130,000,000	348	130,000,000	348	130,000,000	1044	390,000,000	
		7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan pembayaran upah dan tunjangan Non ASN (12 bulan)	KEC = 1 lap x 12 bln KEL = 8 lap x 12 bln	laporan	1	108	616,336,000	108	616,336,000	108	616,336,000	324	1,849,008,000	
		7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	Persentase Barang milik Daerah yang dapat digunakan dari seluruh Barang Milik daerah yang dikuasai oleh perangkat daerah	(Jumlah BMD dalam kondisi baik/ Jumlah BMD yang ada pada OPD) x100% *kondisi baik: dapat digunakan	%	100	80	460,000,000	80	635,000,000	80	435,000,000	80	1,530,000,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUSAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	(Rp)	
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah unit kendaraan yang dipelihara pada OPD yang mencakup penyediaan BBM, pembayaran pajak dan service kendaraan	KEC = 12 unit KEL = 43 unit	unit	55	46.00	150,000,000	55.00	150,000,000	55.00	150,000,000	156	450,000,000	
		7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah unit peralatan dan mesin yang dipelihara pada OPD	KEC = 50 unit KEL = 100 unit	unit	108	100	60,000,000	150	60,000,000	150	60,000,000	400	180,000,000	
		7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara pada OPD	KEC = 2 unit KEL = 8 unit	unit	9	9	250,000,000	10	425,000,000	10	225,000,000	29	900,000,000	
	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Perbandingan dari jumlah layanan yang diberikan dengan jumlah total layanan yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan yang dinyatakan dalam persentase (Dispensasi Nikah, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Daftar susunan Keluarga (Pensiun PNS), Surat Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang (JKMPP), Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD), Surat Keterangan Domisili)	(jumlah layanan yang diberikan/jumlah total layanan yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan) x 100%	%	100%	100%	2,678,840,000	100%	2,678,840,000	100%	2,678,840,000	100%	8,036,520,000	
		7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan	Banyaknya pertemuan/rapat koordinasi	4 kali pertemuan rapat koordinasi	kali	-	4	1,000,000	4	1,000,000	4	1,000,000	12	3,000,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUSAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	(Rp)	
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas SDM	Jumlah dokumen pelaksanaan	dokumen	-	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	3.000,000				
		7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	Banyaknya rapat koordinasi layanan persampahan yang dilaksanakan	Jumlah rapat koordinasi layanan persampahan yang dilaksanakan	kali	12	1.328,880,000	1.328,880,000	1.328,880,000	1.328,880,000	3.986,640,000				
		7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Banyaknya laporan petugas kebersihan lapangan setiap bulan	Jumlah laporan petugas kebersihan lapangan setiap bulan (48 org x 12 bulan)	dokumen	576	1.328,880,000	1.328,880,000	1.328,880,000	1.328,880,000	3.986,640,000				
		7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	Banyaknya urusan kelembagaan yang dilimpahkan ke Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Kecamatan	urusan	7	1.348,960,000	1.348,960,000	1.348,960,000	1.348,960,000	4.046,880,000				
		7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah laporan urusan kelembagaan yg dilimpahkan ke kecamatan	Jumlah laporan	laporan	10	1.348,960,000	1.348,960,000	1.348,960,000	1.348,960,000	4.046,880,000				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUSAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	(Rp)	
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Perbandingan jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kecamatan/kelurahan seperti (RT, LPM, Karang Taruna, PKK, Posyandu, Dasawisma, FKKS, FKPM, BKM, PosyanteK, Forum/Pokmas lainnya) dengan Jumlah Penduduk usia produktif (15-60 tahun) yang dinyatakan dalam persentase	(Jumlah Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kecamatan/kelurahan / Jumlah Penduduk usia produktif) x 100%	%	39.97%	39.98%	3,005,840,000	39.99%	3,005,840,000	40.00%	3,005,840,000	40.00%	9,017,520,000	
		7.01.03.2.02	Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Banyaknya jenis kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	jenis	3	3	706,000,000	3	706,000,000	3	706,000,000	9	2,118,000,000	
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga yang ikut berpartisipasi dalam forum musrenbang :RT, PKK, POSYANDU, LPM, KT, FKKS / POKJA KEL SEHAT, POSYANTEK, HIMPAUDI, FORUM ANAK	Jumlah lembaga	lembaga kemasyarakatan	9	9	200,000,000	9	200,000,000	9	200,000,000	27	600,000,000	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Banyaknya kegiatan sarana prasarana yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan sarana prasarana yang dilaksanakan	unit	8	8	80,000,000	8	80,000,000	8	80,000,000	24	240,000,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUSAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	(Rp)	
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Banyaknya Pokmas / Ormas yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat : LPM, PKK, Karang Taruna, FKKS/Pokja Kel Sehat, Posyantek, lembaga Forikan	LPM, PKK, Karang Taruna, FKKS/Pokja Kel Sehat, Posyantek, lembaga Forikan	pokmas / ormas	6	6	426,000,000	6	426,000,000	6	426,000,000	18	1,278,000,000	
		7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	Banyaknya RT di wilayah Kecamatan Padang Panjang Timur	Jumlah Rukun Tetangga	RT	106	107	2,299,840,000	107	2,299,840,000	107	2,299,840,000	321	6,899,520,000	
		7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Banyaknya lembaga kemasyarakatan	Lembaga Rukun Tetangga	lembaga kemasyarakatan	1	1	2,299,840,000	1	2,299,840,000	1	2,299,840,000	3	6,899,520,000	
	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Trantibum pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Jumlah kasus pelanggaran yang dilaporkan di kecamatan padang panjang timur	jumlah laporan pelanggaran yang diterima oleh kecamatan padang panjang timur	laporan	10	10	10,000,000	9	20,000,000	8	20,000,000	27	50,000,000	
		7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib	Banyaknya jenis kegiatan koordinasi trantib	Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib : Monev, Rapat	jenis	2	2	10,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	6	50,000,000	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Banyaknya laporan FKPM	KEC = 12 laporan FKPM KEL = 96 laporan FKPM	laporan	12	108	10,000,000	108	20,000,000	108	20,000,000	324	50,000,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUSAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	(Rp)	
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Perbandingan antara Jumlah urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan Jumlah urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai dengan penugasan kepala daerah yang dinyatakan dalam persentase	(Jumlah urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan / Jumlah urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai dengan penugasan kepala daerah) x100%	%	100%	100%	30,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	130,000,000	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	Banyaknya kegiatan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	kegiatan : MTQ, Tim Ramadhan, HJK, HUTRI, FORKOPIMCA	kegiatan	2	5	30,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	15	130,000,000	
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas dan NasionalKeamanan Lokal, Regional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	Keg : Tim Ramadhan Kecamatan Keg : MTQ	Keg : Tim Ramadhan Kecamatan Keg : MTQ	orang	200	80	20,000,000	200	40,000,000	200	40,000,000	480	100,000,000	
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Keg : Forkopimca Keg : HJK, HUT RI	Keg. Forkopimca : 4 dok Keg. HJK, HUT RI : 2 dok	dokumen	6	6	10,000,000	6	10,000,000	6	10,000,000	18	30,000,000	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, telah ditetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator yang harus dicapai dari tahun 2024-2026. Indikator kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur selama tahun 2024-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 di gambarkan melalui Tabel 7.1 berikut :

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD KOTA PADANG PANJANG 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai	85.00	90.00	93.00	95.00	95.00
2	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	39%	39.20%	39.50%	39.80%	39.80%
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Nilai	97.80	97.81	97.82	97.83	97.83
4	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	39.97%	39.98%	39.99%	40.00%	40.00%
5	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Trantibum pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Laporan	10 laporan	10 laporan	9 laporan	8 laporan	27 laporan

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 berakhir tahun 2023, dan selanjutnya Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Panjang Timur, yaitu sejak Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2024 sampai dengan 2026.
- c. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Padang Panjang Timur tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD, serta digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur dalam mencapai sasaran Renstra.
- d. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra.
- e. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.

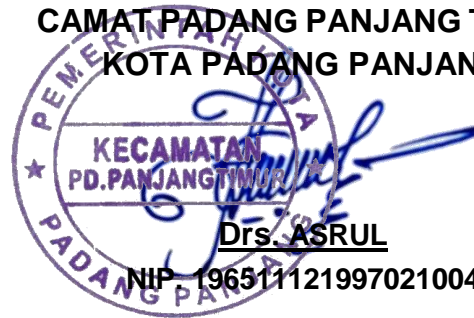
Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan Padang Panjang Timur beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan

dan sasaran Kecamatan Padang Panjang Timur secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang ini akan dijabarkan lagi kedalam Rencana Kerja (RENJA) untuk 3 tahunan kedepan, dengan harapan perencanaan jangka menengah Kecamatan Padang Panjang Timur periode 2024-2026 dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, serta dapat mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan 3 (tiga) tahun ke depan.

Padang Panjang, April 2023

**CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG**



Drs. ASRUL

NIP. 196511121997021004